

UPAYA MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN) DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

FAIZAL

ABSTRAK

Sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah jumlahnya cukup banyak, namun sayangnya tidak semua sekolah itu memiliki kualitas yang sama. Ada beberapa sekolah yang jumlahnya muridnya sedikit dikarenakan sarana dan prasarannya tidak memadai. Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu sekolah dianggap tidak bekerja secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat normatif, sumber data diambil dari dokumen dan wawancara sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Daerah kota Medan terindikasi belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan persyarikatan Muhammadiyah serta Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Keluhan mayoritas para kepala sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah berkisar pada kurangnya arahan, bimbingan, dan evaluasi terhadap sekolah. Keluhan lainnya adalah minimnya fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, hingga minimnya gaji guru dan kepala sekolah, sehingga membuat kinerja mereka tidak maksimal.

Kata kunci: upaya, dikdasmen, kualitas, sekolah

1. Latar Belakang

Kemanusiaan manusia (*insaniyyatul-insan*) dapat diukur dengan interaksinya dengan ilmu pengetahuan. Dalam Alquran dikemukakan agar manusia bekerja pada amal-amal yang menghasilkan ilmu (*afala yanzhurun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun; inna fi dzalika la ayatin li qaumin ya'qilun*), manusia diangkat sebagai khalifah; dibedakan dari makhluk lainnya karena ilmu (Al-Baqarah: 30-33); manusia ideal dalam pandangan Alquran adalah manusia yang mencapai iman dan ketinggian ilmu (Al-Mujadalah: 11); Allah SWT melarang mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya (Al-Isra: 36).¹

Manusia menurut Alquran dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui berbagai cara misalnya melalui indera, seperti *sama'* artinya pendengaran (biasanya bersifat verbal), *bashar* artinya penglihatan, yang muaranya adalah menghasilkan ilmu-ilmu yang bersifat observasional-eksperimental.² Pengetahuan juga dapat dicapai melalui akal, kalbu, *fuad*, yang dengan ini dapat ditangkap ayat-ayat Allah pada kejadian alam semesta. Melalui mekanisme *fuad* ini, kadangkala manusia menghasilkan ilmu transendental-filosofis.

Lembaga pendidikan formal misalnya sekolah menjadi salah satu metode yang digunakan oleh manusia untuk meraih berbagai macam ilmu tersebut. Peran untuk mendirikan sekolah di Indonesia tidak hanya oleh Negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat seperti yang diamanahkan dalam undang-undang, tetapi juga dilakukan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan yang merasa terpanggil untuk ikut serta menyenyapkan keterbelakangan bangsanya. Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persis, Al-Washliyah dan lain-lain adalah sebagian kecil dari sejumlah organisasi sosial keagamaan yang sangat *concern* dalam bidang pendidikan di negeri ini. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan misalnya, sejak awal berdirinya hingga saat ini, tidak pernah berhenti untuk terus mendirikan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (*Busthanul Athfal*) hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (disingkat Dikdasmen) merupakan salah satu lembaga yang membawahi pendidikan tingkat dasar dan menengah pada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Muhammadiyah. Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Pendidikan

¹Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, Albi Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 17.

²*Ibid.*

Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 13-14 Agustus 1996, operasional Majelis Dikdasmen dituangkan dalam Lima Kualitas *Out-put* pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, yakni Kualitas Keislaman, Kualitas Keindonesiaan, Kualitas Keilmuan, Kualitas Kebahasaan dan Kualitas Keterampilan.

Dalam pelaksanaannya Majelis Dikdasmen adalah pembantu Pimpinan Pusat yang membidangi aktivitas pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar membawahi sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan madrasah ibtidaiyah, sedangkan pendidikan menengah membawahi sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah Aliyah. Dalam Pasal 3 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 84/SK-PP/1.a/1998 Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah pada Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, disebutkan: Majelis Dikdasmen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan amal usaha serta tugas pekerjaan dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.

Perguruan atau sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di kota Medan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah di bawah naungan Majelis Dikdasmen saat ini berjumlah 56 (lima puluh enam). Dengan perincian sekolah dasar berjumlah 30 sekolah, sekolah menengah pertama berjumlah 17 sekolah, dan sekolah menengah atas berjumlah 9 sekolah, dengan jumlah siswa kira-kira 5.000 sampai dengan 6.000 siswa.

Berdasarkan fakta tersebut terlihat penyebaran jumlah siswa yang sangat berfluktuasi. Ada sekolah yang jumlah siswanya hampir seribu orang, tapi sekolah lain jumlah siswanya tidak sampai lima puluh orang. Berbagai asumsi muncul sebagai penyebab kondisi jumlah siswa yang sangat fluktuatif tersebut. Salah satunya adalah tidak bekerjanya secara optimal Majelis Dikdasmen sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk dikaji tentang upaya yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) daerah kota Medan dalam meningkatkan kualitas sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah.

2. Metode Penelitian

Apabila dilihat dari segi bahan-bahan atau obyek yang akan diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya.³ Apabila dilihat dari cara menganalisisnya, maka penelitian ini bersifat kualitatif, yang dilakukan terhadap obyek penelitian yang bersifat sosiologis.⁴

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁵ sebagai instrumen utama dan wawancara atau interview yang bersifat lepas dengan beberapa pengurus Dikdasmen Muhammadiyah Daerah Medan sebagai instrumen pendukung. Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Tugas dan Fungsi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Medan

Pendidikan merupakan proses pendewasaan dan sekaligus “memanusiakan” manusia. Dikatakan “memanusiakan” karena manusia lahir hanya membawa bekal potensi. Melalui

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, Cet. Ke-3, hlm. 125.

⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, Cet. Ke-8, hlm. 9.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999, hlm. 21.

⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Cet. Ke-4, hlm. 234.

pendidikan, potensi manusia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna, sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia sejati. Pendidikan pada hakikatnya adalah kerja akal budi atas fitrah yang dibekalkan Tuhan kepadanya. Potensi yang diberikan oleh Tuhan memang dapat dikatakan masih setengah jadi, sehingga butuh sentuhan proses pendidikan agar potensi tersebut berkembang maksimal. Dalam Islam, mengenyam pendidikan dipandang sebagai kewajiban personal sepanjang hayat manusia (*life long education*).

Membahas pendidikan dalam konteks dinamika sosial kultural masyarakat merupakan bidang kajian yang sangat luas, sehingga memerlukan berbagai kerangka analisis dari disiplin keilmuan lainnya.⁷ Dalam hal ini, pendidikan diletakkan dalam konteks yang bersifat makro, yaitu pendidikan sebagai proses kebudayaan. Sebagai proses kebudayaan, pendidikan tidak mungkin mengisolasi dirinya dari perkembangan dan transformasi, baik secara kultural, sosial maupun struktural.⁸ Dalam perspektif global, peran pendidikan masa depan adalah cetak biru (*blue print*) masa depan manusia. Pola kehidupan masyarakat sekarang, secara tidak sadar tengah mempraktikkan gaya hidup modern. Lebih-lebih era industrialisasi, selain perubahan itu telah berdampak positif yakni meningkatkan kuantitas pendapatan ekonomi masyarakat pada satu sisi, juga telah berdampak negatif yakni menipisnya tradisi dan nilai-nilai etis pada sisi yang lain.

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, pendidikan telah menjadi semacam teknologi yang memproduksi manusia masa depan paling efektif. Dari fenomena perkembangan yang terakhir, memberikan petunjuk bahwa pendidikan bukan saja menjadi alat suatu lembaga atau suatu masa dalam berbagai proyeksi berbagai macam tujuan mereka, pendidikan bahkan telag menjadi kebutuhan manusia sendiri secara masal, karenanya pendidikan yang diterima oleh manusia hendaknya pendidikan yang seimbang antara pendidikan lahir dan batin, antara pendidikan dunia dan akhirat, sehingga manusia dalam memperoleh pendidikan tersebut memiliki keseimbangan dalam mengelola kehidupannya untuk dapat mencapai tujuan yang ideal yakni "*fi al-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan*".⁹ Tujuan ideal inilah yang digagas oleh KH. Ahmad Dahlan dalam hal perjuangan di bidang pendidikan yang menjadi warna pendidikan Muhammadiyah.

Jauh sebelum Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1912, KH. Ahmad Dahlan telah merintis pendidikan modern yang memadukan antara pendidikan Barat yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum dan pendidikan Islam yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah di dalamnya sudah termasuk gagasan pembaharuan di bidang pendidikan. KH. Ahmad Dahlan melihat adanya problematika obyektif yang dihadapi oleh pribumi yaitu terjadinya keterbelakangan pendidikan yang akut karena adanya dualisme model pendidikan yang masing-masing memiliki akar dan kepribadian yang saling bertolak belakang. Disatu pihak pendidikan Islam yang berpusat di pesantren mengalami kemunduran karena terisolasi dari perkembangan pengetahuan dan perkembangan masyarakat modern, di pihak lain sekolah model Barat bersifat sekuler dan anasional mengancam kehidupan batin para pemuda pribumi karena dijauhkan dari agama dan budaya negerinya.

Dibandingkan dengan amal usaha lainnya, pendidikan merupakan amal usaha Muhammadiyah yang pertama dan "utama". Pendidikan merupakan amal usaha yang pertama kali didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.¹⁰ Tanpa mengesampingkan amal usaha lainnya, pendidikan dapat pula dikatakan sebagai amal usaha Muhammadiyah yang utama. Harus diakui bahwa jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah jauh lebih banyak dibandingkan dengan

⁷A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, Jakarta, 1999, hlm. 75.

⁸*Ibid.*

⁹Bunyamin, "Dinamika Pendidikan Muhammadiyah", melalui www.faiuhamka.ac.id., diakses tanggal 7 Januari 2017.

¹⁰Abdul Mu'ti, *Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah Menjadi Amal Shalih Profesional dalam Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, LPTP PP Muhammadiyah bekerja sama dengan UAD Press, Yogyakarta, 2003, Cet. Ke-2, hlm. 97.

rumah sakit, panti asuhan, panti jompo dan amal usaha lainnya. Pendidikan sudah menjadi *trade mark* Muhammadiyah. Perhatian dan komitmen Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak pernah surut, hal ini nampak dari keputusan-keputusan persyarikatan yang dengan konsisten dalam setiap muktamar (sebagai forum tertinggi persyarikatan Muhammadiyah) senantiasa ada agenda pembahasan dan penetapan program lima tahunan bidang pendidikan, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Dalam persyarikatan Muhammadiyah, lembaga pendidikan dapat didirikan oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat. Manajemen yang diterapkan oleh Muhammadiyah sangat unik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah melakukan pengawasan dan pembinaan secara umum. Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan tersebut, Muhammadiyah membentuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pengawasan dan pembinaan tingkat SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/SMK/Aliyah. Sedangkan untuk pengawasan dan pembinaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyerahkan kewenangannya kepada Majelis Pendidikan Tinggi. Dalam hal-hal yang bersifat teknis, Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada tingkat pimpinan yang mendirikan lembaga pendidikan tersebut.

Menurut Pasal 3 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 84/SK-PP/III.A/1.a/1998 Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah salah satu majlis yang ada dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan amal usaha serta tugas pekerjaan dalam bidang pendidikan dasar dan menengah. Majelis Dikdasmen disamping memikirkan kemajuan sarana dan prasarana, administrasi serta kurikulum dan silabusnya, juga memikirkan generasi kader yang alim dan intelek, serta intelek yang alim, kader pimpinan bangsa yang andal dan cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.¹¹

Majelis Dikdasmen sebenarnya merupakan ujung tombak tunggal dalam pendidikan Muhammadiyah di tingkat dasar. Oleh karena itu dalam tugasnya Majelis Dikdasmen senantiasa harus melakukan pemantauan terhadap berbagai sekolah pada tingkat dasar dan menengah. Menurut Pasal 4 Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pra penyelenggaraan:
Mempelajari, meneliti, serta menyiapkan pendidikan lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
2. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Meneliti perkembangan dunia pendidikan untuk perkembangan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
3. Penyelenggaraan
Menyelenggarakan lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
4. Pengaturan:
 - a. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan tenaga pendidikan lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 - b. Mengatur pelaksanaan penerimaan siswa lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 - c. Membuat dan menyiapkan kurikulum lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 - d. Membuat pedoman hari sekolah dan hari libur sekolah lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 - e. Membuat pedoman penyelenggaraan keuangan lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 - f. Membuat pedoman laporan penyelenggaraan lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.

¹¹Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 84.

5. Pembinaan dan pengawasan:

Membina dan mengawasi lembaga pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.

Itulah beberapa fungsi dari Majelis Dikdasmen secara umum jika dilihat dari Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Menurut Pasal 9 Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen Daerah mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan:

Menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

2. Kelembagaan:

- a. Mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada pendidikan dasar.
- b. Mengangkat dan memberitahukan guru dan tenaga pendidikan dan sekolah menengah.
- c. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian pengawas, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah pendidikan menengah dan pendidikan khusus kepada Majelis Dikdasmen Wilayah.

3. Penganggaran:

Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah yang diselenggarakannya bersama kepala sekolah.

4. Pengawasan:

Memantau keadaan keuangan dan perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang diselenggarakan dan dibinanya untuk dilaporkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Majelis Dikdasmen Wilayah.

Berdasarkan Pasal 9 Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, dapat dilihat bahwa Majelis Dikdasmen turut bertanggungjawab atas kemajuan sekolah dasar dan menengah yang menjadi domain wilayahnya. Majelis Dikdasmen Daerah tidak hanya sekedar memantau atau mendengarkan laporan dari kepala sekolah, tapi juga harus melihat perkembangan sekolah dasar dan menengah yang ada di daerahnya.

Berdasarkan tugas tersebut, maka Majelis Dikdasmen harus mampu mencari solusi efektif terhadap sekolah yang mengalami stagnasi atau kemunduran dalam pengelolaannya. Sering dikatakan bahwa tugas Majelis Dikdasmen hampir sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu sama-sama memiliki peran dan fungsi sebagai penanggungjawab penuh terhadap proses pendidikan yang ada di kabupaten/kota, dan juga memiliki kesamaan dalam hal penanggungjawab terhadap sumber daya manusia/tenaga pendidik dan kependidikan di semua tingkat satuan pendidikan, termasuk juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan guru/karyawan di sekolah negeri.

Peran dan fungsi tersebut di atas akan bertambah berat apabila dihubungkan dengan proses keberhasilan program pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Hal ini tentu saja sangat berhubungan dengan berbagai perangkat yang harus disiapkan oleh sekolah dalam upaya mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang sedang berlangsung.

Tugas Majelis Dikdasmen selanjutnya adalah bagaimana agar seluruh kegiatan di sekolah, baik pembelajaran maupun pengelolaan dapat berjalan dengan efektif dan kreatif. Peran Majelis Dikdasmen dalam persoalan ini tampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan sumber daya dan dana yang dimiliki, semestinya Majelis Dikdasmen dapat mengambil peran yang cukup strategis, terutama peran supervisi pendidikan guna mengevaluasi semua program sekolah, sehingga semua tugaskependidikan dapat berlangsung dengan baik.

Untuk itu diperlukan personal anggota Majelis Dikdasmen yang mengerti dalam masalah pendidikan serta memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ada dalam Qa'idah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Daerah. Intinya bahwa yang menjadi anggota Majelis Dikdasmen Daerah harus mampu melaksanakan tugas secara penuh dan bertanggungjawab demi kelangsungan hidup sekolah-sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah yang ada di kota Medan, yang di dalamnya terdapat ribuan siswa, serta tenaga-tenaga pendidik dan pegawai yang menggantungkan hidup pada sekolah-sekolah itu.

¹²Rachmat Suprpto, "Supervisi Pendidikan dan Peran Majelis Dikdasmen", melalui www.galihk.blospot.com, diakses tanggal 7 Januari 2017.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah yang ada di kota Medan, terlihat masih banyak tugas yang belum maksimal dilaksanakan secara baik oleh Majelis Dikdasmen Kota Medan. Hal-hal yang terungkap dalam wawancara dengan beberapa kepala sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah itu antara lain intensitas kunjungan yang minim dari Majelis Dikdasmen Daerah Medan ke sekolah-sekolah. Majelis Dikdasmen Daerah Medan dalam hal ini hanya bekerja sesuai dengan pemahaman mereka sesuai dengan program yang ada tanpa memerhatikan apakah program itu sesuai dengan sekolah atau tidak.

Seharusnya Majelis Dikdasmen Daerah Medan bekerja untuk meningkatkan mutu/kualitas sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah kota Medan dengan cara melengkapi sarana-sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu perekrutan tenaga pengajar yang harus sesuai dengan *basic* dan apa yang diajarkannya, dengan kualifikasi S1¹ tentunya. Majelis Dikdasmen juga harus membuat sistem dan manajemen yang terbuka, membuat kurikulum yang sifatnya adaptif, memberikan kesejahteraan guru yang seimbang dan menyenangkan, membuat program kerja sama antara pihak sekolah, orang tua murid dan masyarakat, mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah terutama Dinas Pendidikan.

Dapat disimpulkan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam pandangan beberapa kepala sekolah, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang paham tentang pendidikan.
2. Kurangnya komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua murid dan masyarakat.
3. Menerima guru yang tidak sesuai dengan *basic* (latar belakang) pendidikan yang diajarkan.
4. Kurangnya penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan perkembangan zaman.
5. Program dan sistem tidak sesuai dengan visi, misi sekolah sehingga target dan tujuan tidak tercapai.
6. Tidak seragamnya pemahaman mereka terhadap visi dan misi sekolah.
7. Kurangnya program tentang pelatihan guru-guru.
8. Kurang memberikan semangat/motivasi kepada guru-guru.
9. Masih lemahnya perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program dan kegiatan.
10. Masih lemahnya peran Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
11. Masih lemahnya peran Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam upaya pengembangan kualitas dan kuantitas usaha bidang pendidikan dasar dan menengah.
12. Masih minimnya diadakan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah.
13. Masih minimnya penyampaian masukan dari Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah.
14. Masih lemahnya pelaksanaan kewenangan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam pengusulan dan pengangkatan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMP dan bentuk lain yang sederajat di kota Medan.
15. Masih lemahnya hubungan vertikal Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam penyelenggaraan amal usaha, program dan kegiatan persyarikatan dibidang pendidikan dasar dan menengah, sehingga kegiatan tersebut diselenggarakan oleh lembaga di atasnya atau lembaga dibawahnya tanpa berkoordinasi dengan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan.
16. Masih lemahnya hubungan horizontal Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dengan majlis dan lembaga lain serta organisasi otonom, sehingga Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan Majelis dan lembaga lain serta organisasi otonom setingkat.
17. Masih lemahnya hubungan dan kerja sama Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dengan pihak lain diluar Persyarikatan, seperti dalam pengadaan buku pelajaran, pakaian seragam, pengadaan media pembelajaran, bimbingan belajar, pameran pendidikan dan lain-lain.

18. Masih minimnya pelaksanaan rapat-rapat dalam lingkungan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan, baik rapat pimpinan majlis, rapat kerja majlis maupun rapat koordinasi.

Secara umum dalam pandangan beberapa kepala sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah kota Medan menjalankan tugas dan fungsinya masih secara insidental, dan masih lebih banyak menunggu laporan masuk daripada melakukan kegiatan aktif turun ke bawah langsung untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Seharusnya Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan melaksanakan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2006, serta mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar sarana dan prasarana
5. Standar pengelolaan
6. Standar pembiayaan
7. Standar penilaian.

Kritik paling tajam dilontarkan terkait dengan kelemahan atau kekurangan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan yaitu lemahnya kohevisitas antar sesama unsur pimpinan majlis, sehingga beberapa kali terjadi pergantian unsur pimpinan majlis. Akibatnya, energi unsur pimpinan majlis lebih banyak tersita untuk mengurus masalah internal daripada memikirkan upaya peningkatan mutu sekolah dilingkungan Majelis Dikdasmen kota Medan.

3.2 Kendala dan Upaya yang Dilakukan Majelis Dikdasmen Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar dan dan Menengah di Kota Medan

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh, untuk meningkatkan program bidang pendidikan dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dan menengah Muhammadiyah dilakukan dengan 4 (empat) tema pokok, yaitu pengembangan kualitas, pengembangan keunggulan, pengembangan kekhasan program, dan pengembangan kelembagaan yang mandiri. Empat tema pokok ini diimplementasikan dalam proses belajar agar secara terpadu merupakan aktivitas alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai.

Langkah selanjutnya adalah menata kembali kurikulum pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah pada semua jenjang dan jenis sekolah Muhammadiyah yang meliputi pendidikan al-Islam Kemuhammadiyah dan sebagai kekhasan sekolah Muhammadiyah, spesifikasi setiap wilayah sesuai kebutuhan dan kondisi setempat, pendidikan budaya dan seni bernafas Islam. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan mutu/kualitas pendidikan dasar dan menengah milik Muhammadiyah yang selama ini diindikasikan masih kalah dari sekolah lainnya.

Program peningkatan mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna. Dewasa ini mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban.

Banyak mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan.¹³ Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

¹³Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, Ahmad, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang *concern* terhadap pendidikan, dalam beberapa Keputusan Mukhtamar berkenaan program pendidikan bukan sekedar keinginan, akan tetapi program-program tersebut merupakan bentuk komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Keputusan-keputusan berkenaan dengan bidang pendidikan tersebut mendeskripsikan betapa Muhammadiyah menjadikan lembaga pendidikan sebagai pilar strategis dalam mendukung tujuan Muhammadiyah.

Khusus dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah di kota Medan, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah kota Medan yaitu dengan mengadakan pelatihan bidang studi misalnya mata pelajaran Islam dan Kemuhammadiyah, sedangkan pelatihan untuk kepala sekolah itu menjadi urusan yang menjadi kewenangan Majelis Dikdasmen Wilayah.

Apa yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah, selama ini tentu saja tidak cukup. Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan dalam hal ini sepertinya lupa dengan beberapa prinsip peningkatan mutu pendidikan, yaitu:

1. Peningkatan mutu pendidikan kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan di negara ini.
2. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pembangunan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
3. Peningkatan mutu harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
4. Kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, akuntabilitas, dan ekognisi. Uang tidak menjadi guna bersaing di dunia global.
5. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki baik efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.
6. Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
7. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
8. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.

9. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.¹⁴

Berdasarkan hal itulah, maka Majelis Dikdasmen Kota Medan sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk memantau perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang diselenggarakan dan dibina, berkewajiban untuk segera mengevaluasi kinerja mereka selama ini.

Lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah secara nasional di setiap jenjangnya rata-rata telah memberikan kontribusi sebesar 10% tentu suatu angka yang signifikan. Tetapi jika dilihat agak mendalam, dari sekian persen tersebut yang betul-betul berkualitas hanya sebagian kecil saja. Bahkan, telah terjadi kecenderungan di berbagai daerah sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak yang mulai ditinggalkan peminatnya.

Kecenderungan di atas sangat strategis, karena Indonesia sedang menghadapi perubahan menuju era kompetisi global (*global competitiveness*) yang ditandai dengan AFTA (*Asian Free Trade Area*) dan perdagangan bebas dunia. Jika kualitas pendidikan Muhammadiyah seperti saat ini hingga satu dekade lagi, maka kemunduran bakal terjadi pada diri Muhammadiyah, bahkan Muhammadiyah akan dicap sebagai organisasi yang tradisional.

Menyadari akan perubahan tersebut, maka tugas pokok ke depan pendidikan Muhammadiyah adalah melakukan improvisasi konsep pendidikan Muhammadiyah. Mengimprovisasi mulai dari segi basis filosofis, pilihan-pilihan paradigma yang dikembangkan sesuai skala prioritas kebutuhan, dari sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, kualitas tenaga pengajar, sistem kontrol, dan evaluasi yang dilakukan oleh persyarikatan.

Majlis Dikdasmen Daerah seperti yang tertera dalam Pasal 9 Qa’idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Dikdasmen Daerah bertugas sebagai pengawas (*controlling*) terhadap amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah dalam lingkup kabupaten/kota. Berpijak dari ketentuan tersebut, maka perlu juga untuk melihat apa yang menjadi kendala dari Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ada banyak hambatan dan kendala yang dialami oleh Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan ketika menjalankan tugasnya, yaitu terbatasnya jumlah personil yang ada. Harus diakui bahwa dengan 56 sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah yang ada di kota Medan yang harus terus dipantau dan diawasi, agak sulit untuk mendeteksi secara total dan kontinu serta rutin perkembangan sekolah-sekolah itu. Kendala lain adalah letak geografis sekolah yang saling berjauhan serta luasnya daerah yang harus dijelajahi, memang agak riskan mengharapakan pengawasan serta pemberian bimbingan dan arahan yang maksimal dari personil Majelis Dikdasmen Daerah.

Menjadi hal yang sangat dapat diterima jika diantara sekolah-sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah di kota Medan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif. Perkembangan yang fluktuatif tersebut muaranya adalah timpangnya kualitas antara satu sekolah Muhammadiyah dengan sekolah Muhammadiyah yang lain. Untuk meminimalisir perbedaan kualitas sekolah yang timpang tersebut, Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan mengadakan pembinaan terhadap guru-guru, dan juga pertemuan rutin yang digelar dengan pihak sekolah.

Majlis Dikdasmen Daerah kota Medan juga mengakui ada kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas/mutu sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah di kota Medan. Kendala tersebut adalah minimnya pendanaan yang ada. Imbasnya adalah sarana dan prasarana yang di beberapa sekolah masih minim. Minimnya pendanaan juga menjadi penyebab masih minimnya honor/gaji guru dan kepala sekolah di sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah di kota Medan. Apalagi ditambah dengan tidak adanya sistem subsidi silang antarsekolah sebagai upaya untuk meminimalisir dampak kualitas dan sarana serta prasarana yang tidak merata.

¹⁴*Ibid*, hlm. 9-10.

Kendala lain adalah perekrutan tenaga pendidik/guru yang tidak memenuhi standar persyarikatan Muhammadiyah. Hal itu berakibat buruk kepada mutu peserta didik, karena peserta didik diajar oleh guru yang tidak berkompeten dengan mata pelajaran yang diasuhnya. Dalam hal ini Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan mungkin alpa, bahwa untuk mendapatkan guru yang profesional dan kompeten, diperlukan dana yang banyak untuk honor/gajinya, sementara sekolah-sekolah Muhammadiyah mayoritas belum mampu melakukan hal itu.

Kendala lainnya adalah seringnya terjadi pergantian guru misalnya lulus CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Imbasnya adalah terjadi ketidaksinambungan atau ketidaksinkronan antara guru baru dengan peserta didik. Fakta ini juga tidak terlepas dari minimnya gaji yang diperoleh oleh guru serta masa depan yang tidak jelas jika tetap harus bertahan di sekolah Muhammadiyah.

Majlis Dikdasmen Daerah kota Medan mengelak ketika dikatakan tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, apalagi turut bertanggungjawab terhadap lebarnya kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lain. Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan malah berkilah dengan mengatakan bahwa pihak sekolah kadang-kadang tidak menjalankan instruksi dari Dikdasmen Daerah kota Medan. Alasan lain adalah bahwa Majelis Dikdasmen tidak memiliki wewenang untuk menindak sekolah yang tidak menjalankan instruksi serta tidak adanya sanksi dari Persyarikatan jika pihak sekolah tidak mau melaksanakan instruksi Majelis Dikdasmen Daerah. Disamping itu Majelis Dikdasmen Daerah hanya berwenang untuk mengangkat kepala sekolah, sementara untuk masalah finansial itu menjadi wewenang Majelis Dikdasmen cabang.

Hal lain yang menjadi kendala adalah beberapa sekolah yang sudah diberikan arahan dan bimbingan agar dapat berkualitas baik tetapi tetap saja kualitasnya buruk, sehingga Majelis Dikdasmen Daerah terpaksa memindahkan lokasi sekolah atau bahkan menutup sekolah tersebut. pemindahan lokasi serta penutupan sekolah merupakan pekerjaan berat yang harus dipikul. Manajemen yang salah urus dari pihak sekolah membuat pekerjaan Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan menjadi lebih berat.

Majlis Dikdasmen sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan yang bertanggungjawab penuh terhadap persoalan pendidikan Muhammadiyah memiliki peran yang cukup penting dalam konteks meningkatkan mutu/kualitas sekolah. Kemajuan dan kemunduran sekolah Muhammadiyah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, sumber data manusia, pengawalan terhadap kurikulum yang berlangsung, masalah kesejahteraan guru yang ada di semua tingkat satuan pendidikan dan sebagainya. Sering diungkapkan bahwa tugas Majelis Dikdasmen hampir sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu sama-sama memiliki peran dan fungsi sebagai penanggungjawab penuh terhadap proses pendidikan yang ada di kabupaten/kota, dan juga memiliki kesamaan dalam hal penanggungjawab terhadap sumber daya manusia/tenaga pendidik dan kependidikan di semua tingkat satuan pendidikan, termasuk juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan guru/karyawan di sekolah negeri.

Tugas Majelis Dikdasmen selanjutnya adalah bagaimana agar seluruh kegiatan di sekolah, baik pembelajaran maupun pengelolaan dapat berjalan dengan efektif dan kreatif. Peran Majelis Dikdasmen dalam persoalan ini tampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan sumberdaya dan dana yang dimiliki, semestinya Majelis Dikdasmen dapat mengambil peran yang cukup strategis, terutama peran supervisi pendidikan guna mengevaluasi semua program sekolah, sehingga semua tugas kependidikan dapat berlangsung dengan baik.

Menurut peneliti, kendala yang dihadapi oleh sebagian besar sekolah Muhammadiyah pada saat ini adalah figur kepemimpinan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah secara umum hampir mengalami kesulitan mencari pola pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan terkadang sulit membedakan antara pola kepemimpinan organisasi sekolah dengan organisasi persyarikatan Muhammadiyah, karena dalam mengelola sekolah, pola kepemimpinannya hampir sama dengan mengelola organisasi persyarikatan Muhammadiyah.

Adanya budaya organisasi yang kurang sehat ini mengakibatkan kecenderungan sekolah menjadi tidak berdaya. Sebab, kepemimpinan dalam sekolah tidak dapat disamakan dengan kepemimpinan dalam organisasi persyarikatan. Kepemimpinan di sekolah lebih bersifat "birokratis" ketimbang di organisasi persyarikatan. Dengan demikian, pencampuradukan

budaya kepemimpinan organisasi persyarikatan ke dalam sekolah mengakibatkan semakin tidak efektifnya kepemimpinan sekolah.

Kecenderungan budaya kepemimpinan organisasi persyarikatan itu tampak dalam kepemimpinan di sekolah Muhammadiyah, yaitu berkembangnya pola kepemimpinan *laizzes faire*, yaitu pola kepemimpinan yang tidak banyak berusaha untuk menjalankan kontrol atau pengaruh terhadap para anggotanya. Gaya kepemimpinan seperti ini memberikan kebebasan kepada personel-personel secara leluasa dengan tidak disertai daya kontrol yang kuat, sehingga hubungan-hubungan yang semestinya menambah kemitraan akhirnya menjadi kurang baik. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan pemimpin sekolah tidak dapat memperoleh hasil yang baik, karena masing-masing personel tidak merasa ada perhatian yang serius. Bahkan kecenderungan pola seperti ini kepemimpinan bisa kehilangan arah dan kontrol. Pemimpin tidak mempunyai konsepsi yang jelas untuk pengembangan sekolah. Pemimpin tidak berdaya untuk menggerakkan personel-personel secara efektif.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa:

- a. Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Daerah kota Medan terindikasi belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan persyarikatan Muhammadiyah serta Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Keluhan mayoritas para kepala sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah berkisar pada kurangnya arahan, bimbingan, dan evaluasi terhadap sekolah. Keluhan lainnya adalah minimnya fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, hingga minimnya gaji guru dan kepala sekolah, sehingga membuat kinerja mereka tidak maksimal.
- b. Pada hakikatnya Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan telah berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun berbagai kendala yang dihadapi seperti kendala geografis dan sedikitnya personil yang ada dalam Majelis tersebut, membuat fungsi pengawasan yang menjadi domain tugas dan fungsi mereka jadi terabaikan.

4.2 Saran

- a. Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan hendaknya melakukan reevaluasi terhadap kinerjanya, baik itu dengan program maupun terkait dengan personil yang ada, untuk dikemudian hari dapat bekerja lebih maksimal dalam upaya meningkatkan mutu/kualitas sekolah dasar/menengah Muhammadiyah kota Medan.
- b. Majelis Dikdasmen Daerah kota Medan hendaknya sering turun ke sekolah-sekolah untuk melihat perkembangan sekolah-sekolah, serta mendengarkan berbagai masukan, baik itu sifatnya kritik, keluhan, saran, untuk membenahi kualitas/mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti, 2003, *Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah Menjadi Amal Shalih Profesional dalam Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, LPTP PP Muhammadiyah bekerja sama dengan UAD Press, Yogyakarta, Cet. Ke-2.
- Abuddin Nata, 1999, *Metodologi Studi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-3.
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, Albi Publishing, Jakarta.
- Malik Fadjar, A., 1999, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Ke-4.
- Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, Ahmad, 2006, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1994, *Metodologi Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-8.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, 2005, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Situs Internet

- Bunyamin, "Dinamika Pendidikan Muhammadiyah", melalui www.faiuhamka.ac.id., diakses tanggal 7 Januari 2017.
- Rachmat Suprpto, "Supervisi Pendidikan dan Peran Majelis Dikdasmen", melalui www.galihk.blospot.com, diakses tanggal 7 Januari 2017.